



## **Distribusi Beras Berbasis *Offtaker* Lokal: Strategi Peningkatan Daya Tawar Petani di Kabupaten Purworejo**

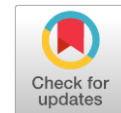
Gholib Tamam Fauzi\*

Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia

\*Corresponding Email: [gholib.tamam.f@mail.ugm.ac.id](mailto:gholib.tamam.f@mail.ugm.ac.id)

Received: 28<sup>th</sup> November 2025; Last Revised: 9<sup>th</sup> January 2026;  
Accepted: 9<sup>th</sup> January 2026; Available Online: 21<sup>st</sup> January 2026



### ***Abstract***

*This study explores the potential of local off-takers in improving the bargaining power of rice farmers in Purworejo, Central Java, by addressing inefficiencies in the current rice distribution system. Despite Purworejo being a major rice producer with an annual average of 279,000 tons, farmers often face low bargaining power due to the long and inefficient supply chain. Farmers typically sell wet paddy to middlemen or collectors at low prices, especially during the harvest season, resulting in incomes below the government's purchasing price. This research uses a qualitative descriptive approach, including literature review, document analysis, and comparative studies from other regions like Kendal, Grobogan, Pinrang, and East Lampung. The findings indicate that the success of the local off-taker model depends heavily on the strength of local institutions, such as cooperatives and BUMDes. In regions with strong institutions like Kendal and Pinrang, the model has stabilized prices and increased farmers' income. Conversely, in Purworejo and East Lampung, weak local institutions prevented competitiveness. This study recommends strengthening local off-taker institutions, enhancing market access, providing financing schemes, and improving post-harvest infrastructure to create a more efficient and equitable distribution system, thereby boosting the competitiveness of local rice and improving farmers' welfare.*

**Keywords:** Rice Distribution, Local Off-Taker, Farmers' Bargaining Power, and Agricultural Institutions

**JEL Classification:** Q13, Q18, and O13

<https://doi.org/10.14710/jdep.8.0.147-167>



This is an open-access article under  
the CC BY-SA 4.0 license

Copyright © 2025 by Authors, Published by Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro

## Pendahuluan

Sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan, memegang peran vital dalam perekonomian lokal di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras utama di wilayah selatan Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, produksi padi Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 mencapai 279.478 ton dengan luas panen sekitar 51.878 hektare, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu penyumbang signifikan terhadap ketahanan pangan di Jawa Tengah (BPS Jateng, 2024). Potensi agraris yang tinggi tersebut juga nantinya akan didukung oleh keberadaan lahan irigasi teknis yang luas, terutama dengan adanya Bendungan Bener.

Meski di Kabupaten Purworejo terjadi keberlimpahan produksi, hal tersebut tidak serta merta menjamin kesejahteraan petani. Hal tersebut sesuai dengan temuan dari Fauzia dan Nugraha (2019) serta penelitian di beberapa wilayah lain yaitu Kabupaten Probolinggo (Pratama dan Nasikh, 2022), Kabupaten Tabanan (Adnyani et al, 2022), Kabupaten Situbondo (Dinan, 2023), serta Kabupaten Bojonegoro (Utami dan Pertiwi, 2022). Salah satu permasalahan mendasar yang terus ditemui ialah panjangnya rantai distribusi gabah dan beras yang melibatkan berbagai aktor perantara mulai dari tengkulak, penggilingan, pedagang besar, hingga distributor ritel. Rantai yang terlalu panjang ini menyebabkan nilai tambah hasil produksi justru dinikmati oleh aktor hilir, sementara petani sebagai produsen utama berada pada posisi paling lemah dalam struktur pasar. Menurut Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (2021), petani rata-rata hanya memperoleh sekitar 30–40 persen dari harga jual akhir beras di pasar konsumen, sedangkan sisanya dinikmati oleh mata rantai distribusi lainnya. Temuan serupa juga ditemukan oleh peneliti lain yaitu Arida et al (2023), Utami et al (2022), serta Silaban & Yuliawati (2019).

Permasalahan terkait panjangnya rantai distribusi beras juga semakin kompleks ketika memasuki musim panen raya. Harga gabah cenderung anjlok akibat pasokan melimpah dan terbatasnya kemampuan petani untuk menyimpan atau menunda penjualan. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Purworejo (2020) menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2014 hingga 2017 berada di bawah Rp4.900/kg. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 dengan rata-rata harga mencapai Rp5.017/kg. Secara lengkap data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rata-Rata Harga Gabah Tingkat Petani di Kabupaten Purworejo

Tahun	Gabah Kering Giling	Gabah Kering Panen	Gabah Kualitas Rendah	Rata-Rata
2014	Rp4.580/kg	Rp4.352/kg	Rp3.650/kg	Rp4.443/kg
2015	Rp5.565/kg	Rp4.475/kg	n.a	Rp4.894/kg
2016	Rp5.750/kg	Rp4.490/kg	Rp3.590/kg	Rp4.556/kg
2017	Rp5.609/kg	Rp4.889/kg	Rp3.700/kg	Rp4.831/kg
2018	Rp5.650/kg	Rp5.202/kg	Rp4.100/kg	Rp5.246/kg
2019	n.a	n.a	n.a	n.a
2020	Rp5.067/kg	Rp5.017/kg	n.a	Rp5.042/kg

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2014-2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari tahun 2014 hingga 2020 terjadi tren peningkatan rata-rata harga gabah tingkat petani di Kabupaten Purworejo baik gabah kering giling, gabah kering panen, maupun gabah kualitas

rendah. Peningkatan harga tersebut tidak dapat selalu diartikan membaiknya kondisi petani di Kabupaten Purworejo namun bisa juga terjadi akibat terjadinya inflasi atau kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk itu, harga tersebut perlu dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terkait komoditas tersebut dengan rincian sesuai tabel berikut.

**Tabel 2. Harga Pembelian Pemerintah untuk Komoditas Gabah Periode 2014-2024**

Tahun	Gabah Kering Giling	Gabah Kering Panen
2014	Rp4.150/kg	Rp3.350/kg
2015	Rp4.600/kg	Rp3.750/kg
2016	Rp4.600/kg	Rp3.750/kg
2017	Rp4.600/kg	Rp3.750/kg
2018	Rp4.600/kg	Rp3.750/kg
2019	Rp4.600/kg	Rp3.750/kg
2020	Rp5.250/kg	Rp4.250/kg
2021	Rp5.250/kg	Rp4.250/kg
2022	Rp5.250/kg	Rp4.250/kg
2023	Rp6.200/kg	Rp5.100/kg
2024	Rp7.300/kg	Rp6.100/kg

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014-2024

HPP ditetapkan dengan mengacu pada regulasi pemerintah terkait penetapan harga komoditas gabah yang akan dijual kepada pemerintah. Berdasarkan data tersebut dan dibandingkan dengan tabel di atas, diketahui bahwa harga gabah kering giling dan gabah kering panen dari tahun 2014 hingga 2018 selalu di atas HPP sehingga hal tersebut dirasa cukup baik bagi kesejahteraan petani. Meskipun demikian, berdasarkan data yang tersedia pada website BPS, tahun 2020 harga gabah kering giling justru di bawah HPP meskipun tahun-tahun berikutnya HPP selalu mengalami kenaikan secara gradual.

Secara rata-rata, harga gabah relatif stabil yang ditunjukkan dari lebih besarnya harga pada tingkat petani dibanding HPP yang ditetapkan setiap tahun. Meskipun demikian, kondisi tersebut sangat kontras terjadi saat musim panen raya. Menurut Purworejo.sorot.co (2023), masih ditemukan gabah petani hanya dihargai Rp3.300/kg hingga Rp3.600/kg pada tahun 2023. Selain itu, media NU Online (2025) juga menemukan adanya gabah petani yang hanya dihargai Rp.5.000/kg di wilayah Indramayu, Ngawi, Cilacap, Pati, dan Purworejo pada masa panen awal 2025. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi langsung bagi petani, tetapi juga memicu siklus kemiskinan dan ketidakstabilan pendapatan rumah tangga tani.

Di sisi lain, lemahnya posisi tawar petani diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pasar, informasi harga, dan fasilitas pascapanen. Petani kecil di Purworejo pada umumnya masih menjual gabah dalam kondisi basah dan dalam volume kecil, yang membuat mereka sangat bergantung pada tengkulak atau pedagang pengumpul yang datang langsung ke sawah. Di sisi lain, penguatan peran lembaga penyangga seperti Perum Bulog juga masih belum optimal, terutama dalam pelaksanaan pembelian gabah langsung dari petani dengan harga yang layak. Akibatnya, distribusi hasil pertanian tidak mampu memberikan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi produsen utama.

Berdasarkan potensi dan permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting mengingat Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar dalam sektor pertanian,

terutama sebagai salah satu penghasil beras utama di wilayah selatan Jawa Tengah dengan hasil produksi yang tinggi namun petani di daerah tersebut menghadapi permasalahan mendasar terkait distribusi beras yang panjang dan tidak efisien. Penelitian ini penting untuk menemukan solusi untuk meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

Menghadapi berbagai tantangan struktural dalam distribusi gabah dan beras tersebut, diperlukan suatu model distribusi alternatif yang mampu memperpendek rantai pasok sekaligus memperkuat posisi tawar petani. Kondisi ideal yang diharapkan dalam distribusi beras adalah sistem yang lebih efisien dan adil bagi petani. Idealnya, petani harus memiliki akses langsung ke pasar dengan harga yang stabil, tanpa terhambat oleh perantara yang memotong *margin* keuntungan terlalu besar.

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah model distribusi berbasis *offtaker* lokal, yaitu pelaku lokal seperti koperasi, BUMDes, atau perusahaan daerah yang memiliki kapasitas untuk membeli hasil panen petani secara langsung dengan skema harga dan volume yang telah disepakati. Model ini memberikan jaminan pasar dan harga bagi petani, sekaligus mendorong efisiensi distribusi dan peningkatan nilai tambah di tingkat lokal. Dengan adanya model *offtaker* lokal seperti koperasi atau BUMDes, rantai distribusi dapat dipersingkat, meningkatkan nilai tambah di tingkat lokal, dan memperkuat daya saing beras.

Studi oleh Kementerian Pertanian (2022) menunjukkan bahwa model *offtaker* lokal yang dikelola secara profesional dan berbasis kelembagaan petani dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 25–30 persen dibandingkan dengan pola distribusi konvensional. Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang pengembangan industri penggilingan skala kecil dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, potensi implementasi model ini cukup besar mengingat banyaknya kelompok tani aktif, keberadaan BUMDes yang mulai berkembang, serta dukungan infrastruktur distribusi yang membaik seiring pembangunan konektivitas jalan.

Urgensi penelitian ini juga semakin tinggi mengingat adanya dorongan kebijakan nasional untuk mendorong Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Bappenas dan Bappeda Jateng, 2025) sehingga menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem distribusi berbasis lokal dan kemitraan dalam rangka memperkuat daya tawar maupun kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap model distribusi berbasis *offtaker* lokal tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting sebagai masukan kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani secara menyeluruh.

Penelitian terkait distribusi pangan berbasis *offtaker* lokal telah banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Kendal (Sutrisno et al, 2023), Kabupaten Klaten (Arifah & Antriandarti, 2022), dan Kabupaten Pinrang (Beddu et al, 2025) yang tentunya disesuaikan dengan potensi wilayah dan kendala pada masing-masing wilayah. Penelitian tentang penerapan model ini di Kabupaten Purworejo masih terbatas, sehingga menciptakan *gap riset* yang perlu dijawab. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji lebih dalam mekanisme distribusi beras berbasis *offtaker* lokal dan dampaknya terhadap daya tawar petani di daerah ini.

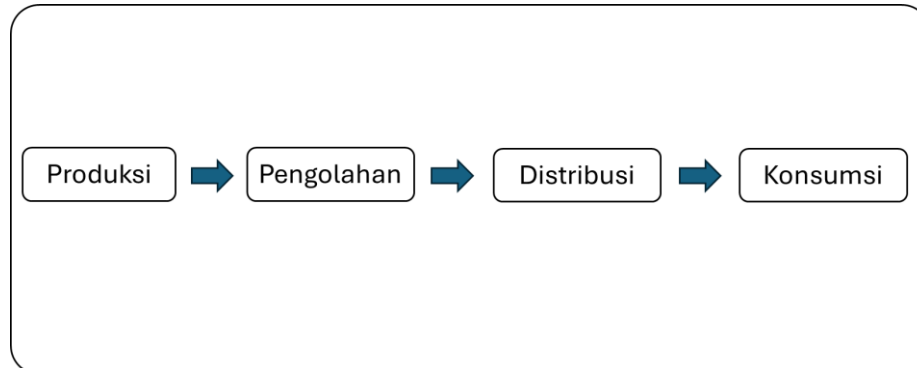
Berdasarkan latar belakang dan urgensi di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengkaji secara komprehensif terkait mekanisme distribusi beras berbasis *offtaker* lokal yang dapat diterapkan di Kabupaten Purworejo dan mengetahui dampaknya terhadap peningkatan daya tawar dan pendapatan petani. Kedua, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan praktik baik untuk mendorong implementasi distribusi berbasis *offtaker* lokal di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dengan dua tujuan tersebut, diharapkan dapat mengetahui mekanisme distribusi beras berbasis *offtaker* lokal yang dapat diterapkan di Kabupaten Purworejo serta dapat dijadikan masukan untuk kebijakan pemerintah dalam mendorong daya saing komoditas beras di Kabupaten Purworejo.

## Tinjauan Teori

### *Teori Rantai Pasok Pertanian*

Konsep rantai pasok sering kali dihubungkan dengan *value chain* atau rantai nilai yaitu proses penambahan nilai mulai dari tahap produksi hingga sampai ke konsumen. Menurut Porter (1985), *value chain* melibatkan semua aktivitas yang menciptakan nilai ekonomi, termasuk pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Rantai pasok pertanian (*agricultural supply chain*) merupakan serangkaian proses yang mencakup seluruh aktivitas mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi produk pertanian oleh konsumen akhir (Christopher, 2016). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Rantai Pasok Pertanian

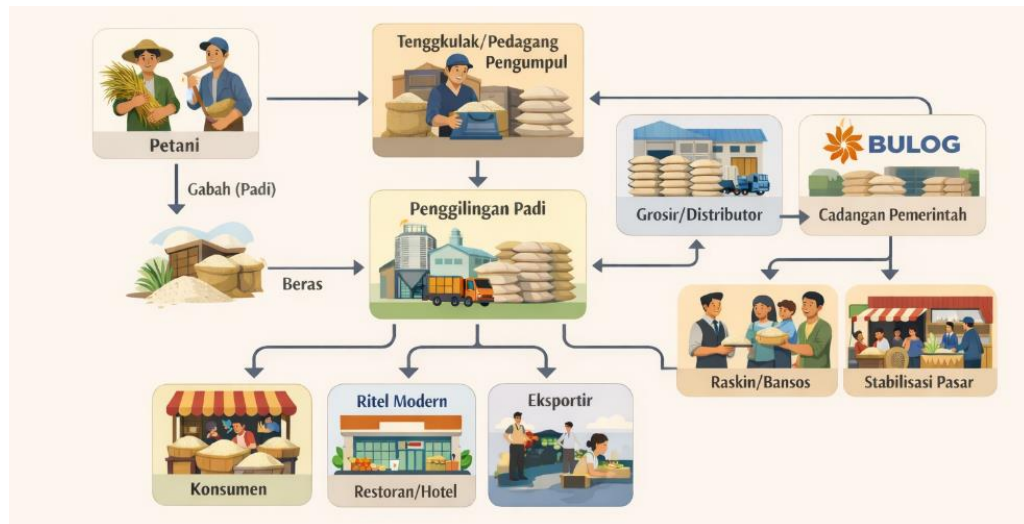
Sumber: Diolah penulis dari Christopher (2016)

Berdasarkan gambar di atas, rantai pasok pertanian paling tidak memuat empat elemen penting yaitu tahapan produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi yang keseluruhannya tidak bisa terpisah satu sama lain. Dalam konteks pertanian modern, rantai pasok tidak hanya sekadar aliran produk fisik, tetapi juga mencakup aliran informasi, finansial, serta koordinasi antar pelaku usaha untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan sistem pangan (Chopra & Meindl, 2019). Rantai pasok yang efektif dapat meminimalisasi kehilangan hasil panen, menekan biaya logistik, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku di hulu, terutama petani.

Dalam sektor pertanian, nilai tambah umumnya terbentuk melalui proses pascapanen seperti penggilingan padi, pengemasan beras, serta pengolahan menjadi produk turunan. Namun demikian, sebagian besar petani kecil di Indonesia,

termasuk di Kabupaten Purworejo, masih terjebak pada peran sebagai produsen bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Hal ini menyebabkan mereka memiliki posisi tawar yang lemah dalam sistem pasar karena tidak terlibat langsung dalam pengolahan dan distribusi hasil pertanian mereka.

Sebagai salah satu bagian penting dalam rantai pasok pertanian, distribusi merupakan salah satu titik kritis dalam keberlanjutan rantai pasok pertanian. Secara umum, distribusi beras di Indonesia dari hulu hingga hilir menuju konsumen akhir tergolong panjang. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Bagan Distribusi Beras di Indonesia  
Sumber: Diolah penulis dari PSEKP (2021)

Berdasarkan studi dari Kementerian Pertanian (2022), sekitar 40% masalah ketidakadilan harga di tingkat petani disebabkan oleh struktur distribusi yang terlalu panjang dan kurang transparan. Di banyak daerah, distribusi hasil pertanian dikuasai oleh jaringan pedagang perantara yang memiliki akses informasi pasar dan kontrol terhadap logistik, sehingga petani hanya menjadi *price taker*. Dalam konteks komoditas beras, panjangnya rantai distribusi menyebabkan disparitas harga yang signifikan antara harga gabah di tingkat petani dan harga beras di pasar konsumen. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Maret 2023 adalah Rp4.600 per kilogram, sementara harga beras di tingkat konsumen mencapai Rp12.000 per kilogram, menunjukkan *margin* distribusi yang sangat besar.

Permasalahan distribusi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan sistem pertanian secara keseluruhan. Petani yang terus menerus mendapatkan harga rendah akan kehilangan insentif untuk meningkatkan produksi atau memperbaiki kualitas produk. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memicu penurunan produktivitas dan memperparah ketimpangan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, distribusi yang lebih adil dan efisien menjadi prasyarat penting bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan (World Bank, 2020).

### ***Model Offtaker Lokal***

Salah satu solusi yang banyak diusulkan untuk memperbaiki sistem distribusi pertanian adalah model *offtaker* lokal. *Offtaker* merupakan pihak yang memiliki perjanjian atau komitmen untuk membeli hasil panen petani dengan harga dan volume tertentu yang telah disepakati sebelumnya (Setiawan et al., 2021). Model ini menciptakan jaminan pasar bagi petani dan mengurangi ketidakpastian harga saat panen. *Offtaker* biasanya berperan sebagai penghubung langsung antara petani dan pasar akhir, baik itu pasar tradisional, ritel modern, maupun industri pengolahan.

Dalam praktiknya, *offtaker* lokal memiliki bentuk yang beragam. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang potensial menjadi *offtaker* lokal. Pertama ialah koperasi petani. Koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada keanggotaan petani itu sendiri. Koperasi dapat mengorganisir hasil panen, melakukan negosiasi harga secara kolektif, serta mengelola distribusi produk ke pasar. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2022) mencatat bahwa koperasi tani di beberapa daerah yang mengelola penjualan gabah secara kolektif mampu meningkatkan harga jual hingga 15% dibandingkan penjualan individu kepada tengkulak. Kedua ialah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa memiliki potensi besar untuk menjadi *offtaker* lokal. Dengan legalitas yang kuat dan dukungan dari pemerintah desa, BUMDes dapat membeli gabah dari petani setempat, mengelola penggilingan padi, dan menjual beras langsung ke pasar konsumen atau lembaga lain seperti ASN, sekolah, dan rumah sakit (Kementerian Desa, 2021). Model ini telah diterapkan di beberapa desa di Jawa Tengah dan menunjukkan peningkatan pendapatan desa dan petani secara bersamaan. Ketiga ialah UMKM dan pengusaha lokal. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang agroindustri juga berperan sebagai *offtaker* lokal, terutama untuk pasar spesifik seperti beras organik atau beras premium. UMKM yang mengelola beras dengan *branding* lokal biasanya lebih dekat dengan pasar ritel dan mampu menyalurkan produk langsung ke konsumen akhir, memotong mata rantai distribusi konvensional (Rahman, 2020).

Peran strategis *offtaker* lokal terletak pada kemampuannya memperpendek rantai pasok (*short supply chain*). Berdasarkan kajian oleh Food and Agriculture Organization (2021), rantai pasok yang lebih pendek dapat meningkatkan efisiensi distribusi hingga 30%, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan transparansi harga. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan petani karena *margin* keuntungan yang sebelumnya dinikmati oleh perantara dapat dialihkan kepada petani dan pelaku lokal.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, pengembangan *offtaker* lokal sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi wilayah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo (2023), terdapat lebih dari 700 kelompok tani aktif dan 150 koperasi pertanian yang dapat diberdayakan sebagai *offtaker*. Selain itu, beberapa BUMDes telah mengembangkan unit usaha pertanian dan penggilingan padi, meskipun masih menghadapi tantangan terkait permodalan dan kapasitas manajerial. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan, model distribusi berbasis *offtaker* lokal berpotensi menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya tawar petani, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan distribusi pangan yang lebih adil.

### ***Penguatan Daya Tawar Petani***

Penguatan daya tawar petani dalam sistem distribusi pangan tidak terlepas dari pemahaman tentang struktur pasar dan posisi *bargaining power* yang dimiliki oleh produsen primer. Dalam teori ekonomi mikro, struktur pasar hasil pertanian umumnya bersifat oligopsoni, di mana terdapat banyak penjual (petani) namun pembelinya terbatas, terutama pada komoditas pangan pokok seperti beras (Schmitz et al., 2010). Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani lemah karena ketergantungan terhadap pembeli yang memiliki kekuatan menentukan harga.

Menurut Porter (1985), kekuatan tawar-menawar dalam pasar sangat dipengaruhi oleh jumlah pelaku, akses terhadap informasi, dan kemampuan pelaku untuk mengendalikan distribusi. Petani skala kecil umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar secara langsung, baik karena kendala logistik, informasi harga, maupun keterbatasan dalam mengelola pascapanen. Oleh karena itu, intervensi melalui model kemitraan strategis menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki posisi tawar petani.

Salah satu model yang relevan adalah *kontrak farming*, yaitu perjanjian formal antara petani dan pembeli (*offtaker*) yang memuat kesepakatan terkait harga, volume, dan waktu penyerahan hasil panen (FAO, 2013). *Kontrak farming* memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjamin kontinuitas pasokan bagi pembeli. Model ini dinilai efektif dalam mengurangi risiko fluktuasi harga dan menghindari praktik tengkulak yang merugikan petani (Susilowati & Rakhman, 2018).

Selain *kontrak farming*, pemberdayaan petani dalam kelembagaan ekonomi seperti koperasi atau asosiasi produsen juga dapat meningkatkan *bargaining power*. Koperasi memiliki fungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai instrumen negosiasi harga secara kolektif (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, 2022). Di beberapa negara, koperasi pertanian mampu menekan disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen hingga 20% lebih rendah dibandingkan dengan distribusi konvensional (OECD, 2020).

### ***Studi Empiris dan Komparatif***

Beberapa studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan distribusi berbasis *offtaker* lokal dan *kontrak farming* dapat meningkatkan pendapatan petani. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, program Sleman Agropreneur yang mengembangkan kemitraan antara kelompok tani dengan koperasi pemasaran beras organik berhasil memperpendek rantai distribusi dari lima mata rantai menjadi dua (kelompok tani – koperasi - pasar modern). Studi oleh Setyowati dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa dengan sistem ini, petani beras organik Sleman mampu memperoleh harga jual 25% lebih tinggi dibandingkan harga konvensional di pasar lokal.

Selain itu, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, skema *offtaker model* diterapkan melalui kemitraan antara BUMDes dan kelompok tani dalam pengelolaan gabah dan beras lokal. Program ini didukung oleh PT. Pupuk Kujang sebagai mitra hilir yang menyerap hasil panen dengan harga yang stabil berdasarkan kontrak tahunan (Purnomo & Riyanto, 2022). Faktor keberhasilan di Subang antara lain adalah adanya fasilitas penggilingan padi milik BUMDes, dukungan pemerintah daerah melalui program resi gudang, serta peran aktif penyuluh



pertanian dalam mendampingi petani. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan modal kerja BUMDes, fluktuasi kualitas gabah, serta resistensi dari pedagang lama yang merasa terancam oleh sistem distribusi baru.

Dari dua studi tersebut, terdapat beberapa pembelajaran penting. Pertama, keberhasilan model *offtaker* lokal sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Kedua, transparansi dalam proses negosiasi harga dan volume sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara petani dan *offtaker*. Ketiga, penguatan logistik pascapanen seperti gudang, alat pengering, dan penggilingan merupakan faktor penentu keberhasilan rantai pasok berbasis lokal.

## **Metode Penelitian**

### ***Pendekatan Penelitian***

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan dan menganalisis fenomena distribusi beras berbasis *offtaker* lokal dengan lebih mendalam, terutama dalam konteks sosial dan kelembagaan. Pendekatan ini sangat relevan untuk menangkap dinamika yang terjadi, di mana faktor-faktor sosial-ekonomi turut mempengaruhi pola distribusi dan daya tawar petani. Dengan menggunakan metode studi literatur, studi dokumen, dan studi komparatif, penelitian ini tidak hanya membandingkan data sekunder, tetapi juga menggabungkan temuan dari daerah lain yang menerapkan model serupa.

### ***Sumber dan Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi yang memiliki kredibilitas dalam menyajikan data terkait sektor pertanian, khususnya distribusi beras di Kabupaten Purworejo. Data yang digunakan antara lain berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, yang menyajikan informasi mengenai harga gabah di tingkat petani serta data produksi padi. Sumber lain yang digunakan adalah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Purworejo, yang memberikan informasi terkait kelompok tani, koperasi, dan penggilingan padi di wilayah tersebut. Selain itu, dokumen kebijakan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan peraturan dari Kementerian Pertanian juga digunakan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga gabah. Penggunaan data sekunder ini dibenarkan karena penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil yang terjadi berdasarkan statistik yang dapat diakses secara publik serta hasil studi terdahulu yang relevan, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komparatif dengan kondisi terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang dilakukan dengan pengumpulan peraturan, laporan tahunan dinas terkait, serta berita resmi statistik terkait produksi dan harga beras. Data juga dikumpulkan melalui studi literatur melalui penelusuran jurnal, artikel ilmiah, serta laporan kajian dari lembaga penelitian seperti FAO, World Bank, dan OECD mengenai rantai pasok pangan, kemitraan pertanian, serta distribusi berbasis lokal, serta studi komparatif untuk mengambil pembelajaran dari wilayah-wilayah lain yang telah menerapkan

model *offtaker lokal* dan *kontrak farming* untuk mendukung distribusi pangan yang lebih adil.

### ***Teknik Analisis***

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai dokumen, data statistik, dan literatur yang berkaitan dengan distribusi beras, peran *offtaker* lokal, serta posisi tawar petani. Analisis isi ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti pola distribusi beras, peran kelembagaan, serta faktor yang mempengaruhi daya tawar petani. Selanjutnya, dilakukan identifikasi pola hubungan antara panjangnya rantai distribusi dengan harga gabah di tingkat petani. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan data dari Kabupaten Purworejo dengan hasil studi di daerah lain yang menerapkan model distribusi serupa. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti BPS, DPPKP Purworejo, studi literatur, serta media daring pemerintah, guna memastikan data yang digunakan akurat dan representatif.

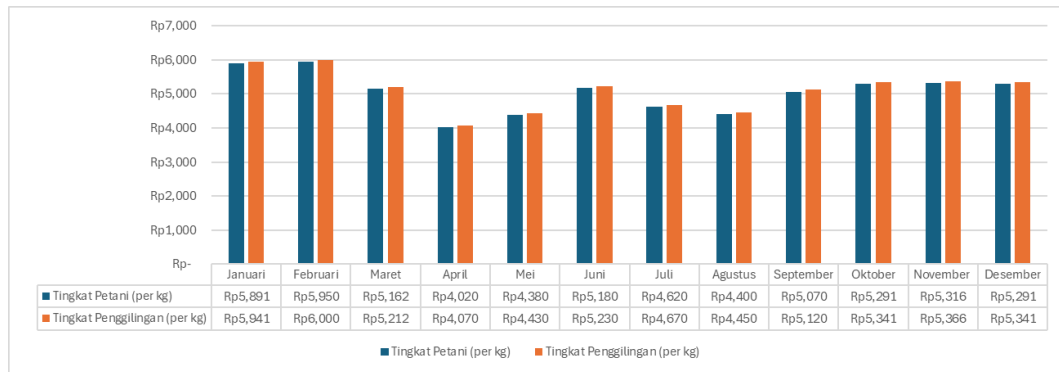
### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Profil Produksi Padi di Kabupaten Purworejo***

Kabupaten Purworejo menjadi salah satu kabupaten yang berperan terhadap ketahanan pangan khususnya sebagai produsen padi di Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan dari luas tanaman panen padi kabupaten tersebut yang menempati peringkat 13 hingga 16 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dalam periode 2021 hingga 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Dengan produksi 258 ribu ton hingga 287 ribu ton pada setiap tahunnya, Kabupaten Purworejo mampu menghasilkan produktivitas tanaman padi sebanyak 53 hingga 56 kuintal per hektar selama empat tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2025).

Meski memiliki sektor pertanian yang potensial, Kabupaten Purworejo juga mengalami kendala sebagai akibat adanya dinamika pasar. Hal tersebut ditunjukkan dari pergerakan harga gabah yang mengalami penurunan pada saat musim panen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pada tahun 2020, HPP ditetapkan Rp5.250/kg untuk gabah kering giling dan Rp4.250/kg untuk gabah kering panen atau tingkat petani. Jika dibandingkan dengan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat kondisi pada bulan April 2020 dimana rata-rata harga gabah kering tingkat petani berada di bawah HPP. Selain itu, terdapat juga kondisi rata-rata harga gabah kering tingkat penggilingan yang berada di bawah harga HPP yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Kondisi tersebut terkonfirmasi konsisten hingga April 2024. Hal tersebut ditunjukkan dari masuknya Kabupaten Purworejo sebagai wilayah di Jawa Tengah dengan harga gabah kering tingkat penggilingan terendah se-Jawa Tengah pada periode tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 3. Rata-Rata Harga Gabah Kabupaten Purworejo Periode Januari – Desember 2020

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2021)

Tabel 3. Harga Gabah di Tingkat Petani dan Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas di Jawa Tengah, April 2024

Kelompok Kualitas	Jumlah Observasi	Harga Gabah di Tingkat Petani (Rp/kg)			Harga Gabah di Tingkat Penggilingan (Rp/kg)		
		Terendah	Tertinggi	HPP	Terendah	Tertinggi	HPP
GKP	80 (35,56%)	4.700 (Blora, Purworejo)	8.200	5.000	4.750 (Purworejo)	8.300 (Kudus)	5.100
GKG	128 (56,89%)	5.000 (Pati, Pekalongan)	9.000 (Jepara)	-	5.050 (Pekalongan)	9.050 (Jepara)	6.200
Luar Kualitas	17 (7,56%)	4.000 (Blora)	6.500 (Wonogiri)	-	4.050 (Blora)	6.550 (Wonogiri)	-

Keterangan:

GKG : Kadar Air  $\leq 14\%$  dan Kadar Hampa  $\leq 10\%$   
GKP : Kadar Air (14,01% - 25%) dan Kadar Hampa  $\leq 10\%$   
Gabah Luar Kualitas : Kadar Air  $> 25\%$  atau Kadar Hampa  $> 10\%$   
HPP berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2023

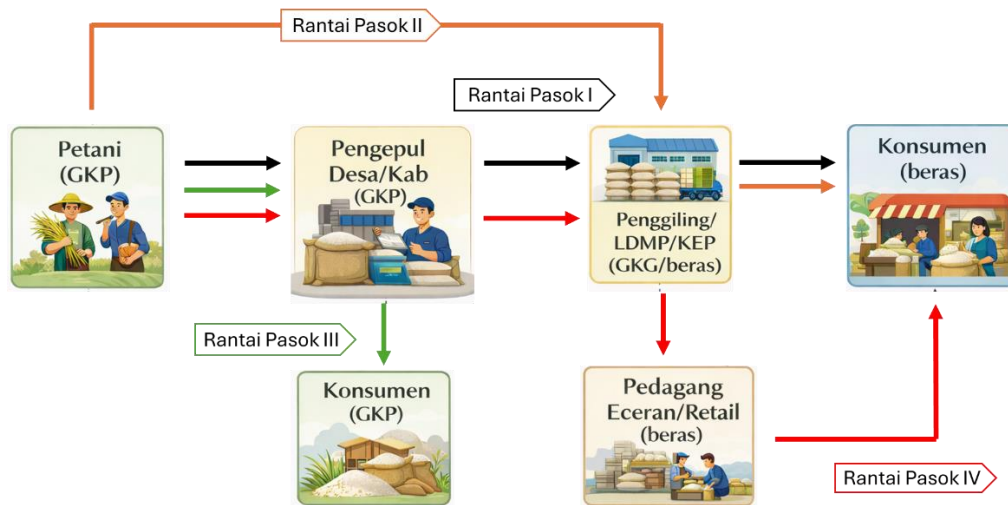
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2024)

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian agar kesejahteraan petani dapat terjamin dan keberlanjutan pertanian itu sendiri dapat tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi agar stok gabah yang diproduksi dapat tetap mencukupi kebutuhan wilayah tersebut dengan tetap memastikan harga yang sesuai dengan HPP. Hal tersebut menjadi penting agar stok gabah yang ada justru tidak dijadikan komoditas untuk dijual ke wilayah yang lain akibat disparitas harga yang signifikan.

### ***Rantai Pasok Beras di Kabupaten Purworejo***

Berdasarkan temuan Hermawati et al (2023) yang dilakukan di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Purworejo yaitu Kecamatan Gebang, Kecamatan Banyuurip dan Kecamatan Ngombol, diketahui bahwa rantai pasok beras melibatkan 3 (tiga) hingga 5 (lima) pelaku yang terdiri dari petani, pengepul desa, pedagang luar kota, penggiling, dan pengecer. Pelaku-pelaku tersebut terlibat ke dalam 4 (empat) saluran rantai pasok (saluran pemasaran). Masing-masing pelaku memiliki

perannya masing-masing. Secara jelas saluran dan hubungan antarpelaku dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Rantai Pasok (Saluran Pemasaran) Komoditas Beras di Purworejo  
Sumber: Diolah Penulis dari Hermawati et al (2023)

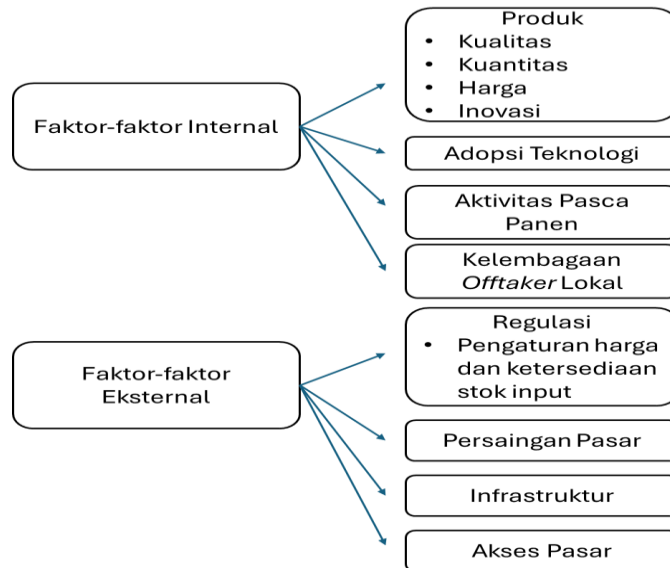
Berdasarkan gambar di atas, terdapat 4 (empat) saluran yang menunjukkan jalur distribusi gabah yang dihasilkan petani hingga sampai ke tangan konsumen di Kabupaten Purworejo. Pada saluran/rantai pasok I, terdapat 4 (empat) pelaku yang terlibat yaitu petani, pengepul desa, penggiling, serta konsumen. Saluran ini merupakan saluran yang paling banyak dijumpai di Kabupaten Purworejo. Saluran/rantai pasok II melibatkan petani, penggilingan padi, dan konsumen. Meski lebih pendek, namun jumlah petani yang mengikuti saluran ini justru tidak banyak bahkan hanya menempati posisi ketiga terbanyak atau kedua terendah. Pada saluran/rantai pasok III, melibatkan hanya 3 (tiga) pelaku yaitu petani, pengepul desa, dan konsumen. Saluran ini menempati posisi kedua terbanyak yang dilakukan di Kabupaten Purworejo. Konsumen dalam saluran ini merupakan pedagang yang berasal dari luar Kabupaten Purworejo sehingga membeli masih dalam bentuk gabah lalu kemudian melakukan penggilingan secara terpisah. Saluran terakhir ialah saluran/rantai pasok IV yaitu melibatkan 5 (lima) pelaku yaitu petani, pengepul desa, penggilingan padi, pedagang eceran, serta konsumen. Saluran ini merupakan saluran terpanjang disbanding tiga saluran lainnya. Meskipun tergolong panjang dan melibatkan banyak pelaku, namun saluran tersebut justru paling sedikit dijumpai di Kabupaten Purworejo.

### **Identifikasi Masalah Utama**

Berdasarkan kondisi rantai pasok beras di Kabupaten Purworejo, dapat digaris bawahi bahwa panjangnya saluran pemasaran bukan merupakan masalah yang dihadapi karena saluran tersebut tidak mendominasi saluran pemasaran di wilayah yang diobservasi. Temuan lebih lanjut Hermawati et al (2023) menunjukkan bahwa pedagang eceran yang diduga memperoleh *margin* keuntungan tertinggi justru hanya memperoleh 2,59% dari harga jual. Proporsi *margin* keuntungan tertinggi

diperoleh penggilingan padi dengan nilai 11,48% hingga 18,08% dari harga jual disusul pedagang pengepul yang memperoleh 4,81% hingga 5% dari harga jual.

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam meningkatkan daya saing pertanian beras di Kabupaten Purworejo. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal terdiri dari produk, adopsi teknologi, aktivitas pasca panen, serta kelembagaan *offtaker* lokal sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi regulasi, persaingan pasar, infrastruktur, serta akses pasar. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Peningkatan Daya Saing Pertanian Beras di Kabupaten Purworejo

Sumber: Diolah Penulis

Daya saing pertanian berdasarkan faktor internal ditentukan secara dominan oleh produk. Produk dalam konteks ini ialah padi atau beras yang dihasilkan petani. Produk tersebut harus baik dari segi kualitas mulai dari pemilihan bibit, pemeliharaan, hingga pada saat panen. Dengan produk yang berkualitas baik maka hal tersebut akan mendukung produktivitas yang tinggi sehingga kuantitasnya optimal dan juga harganya mampu bersaing. Beberapa inovasi pertanian juga tidak kalah dalam meningkatkan daya saing pada/beras yang diproduksi.

Faktor adopsi teknologi juga menjadi variabel penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya produksi. Penggunaan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan benih unggul, sistem irigasi hemat air, serta mekanisasi panen dan olah tanah, terbukti dapat meningkatkan hasil per hektare dan menekan biaya tenaga kerja (Syahyuti, 2018). Dalam praktiknya, tingkat adopsi teknologi ini seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan modal, akses informasi, dan pendampingan teknis di tingkat petani.

Selanjutnya adalah aktivitas pasca panen. Aktivitas ini berperan penting dalam menjaga mutu beras sekaligus mencegah penyusutan nilai hasil panen. Minimnya fasilitas pengeringan, penggilingan yang kurang modern, dan penyimpanan yang tidak standar seringkali menyebabkan degradasi mutu beras lokal sehingga kalah bersaing dengan beras dari daerah lain (Badan Litbang

Pertanian, 2020). Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan pasca panen menjadi aspek strategis dalam memperkuat daya saing beras lokal.

Faktor internal terakhir adalah, kelembagaan *offtaker* lokal. *Offtaker* lokal berperan sebagai penghubung antara petani dengan pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Kelembagaan yang kuat mampu menyediakan kepastian harga dan pasar bagi petani, sekaligus menstabilkan rantai pasok di tingkat lokal (Setiawan & Lubis, 2022). Namun demikian, kelembagaan *offtaker* yang lemah seringkali membuat posisi tawar petani menjadi rendah di hadapan tengkulak dan pedagang besar.

Selain faktor internal, terdapat pula berbagai faktor eksternal yang turut mempengaruhi daya saing beras. Salah satu faktor utama adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan impor beras, penetapan harga eceran tertinggi (HET), dan subsidi pupuk berpengaruh langsung terhadap dinamika pasar dan keberlanjutan usaha tani padi (Kementerian Pertanian, 2021). Regulasi yang inkonsisten atau tidak adaptif terhadap kondisi lokal seringkali menciptakan ketidakpastian bagi petani dan pelaku usaha di sektor perberasan.

Faktor lainnya adalah tingkat persaingan pasar yang semakin terbuka seiring dengan liberalisasi perdagangan dan integrasi pasar domestik dengan pasar global. Petani beras lokal dihadapkan pada kompetisi dengan beras impor maupun beras dari daerah lain yang memiliki efisiensi produksi lebih baik (Firdaus & Aulia, 2020). Hal ini menuntut adanya perbaikan kualitas dan efisiensi agar beras lokal tetap memiliki daya saing.

Selain itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti irigasi, jalan usaha tani, fasilitas penggilingan, dan pasar juga berpengaruh signifikan. Infrastruktur yang baik mendukung efisiensi distribusi dan mengurangi biaya logistik, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani (Susilowati, 2021). Di banyak daerah, kerusakan irigasi dan keterbatasan infrastruktur pasca panen masih menjadi kendala utama dalam pengembangan pertanian beras.

Terakhir, akses pasar menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi posisi tawar petani. Keterbatasan akses terhadap pasar modern, digitalisasi distribusi, dan informasi harga seringkali membuat petani sulit mendapatkan harga yang kompetitif (Rachman et al., 2019). Peran koperasi, kelompok tani, dan dukungan pemerintah dalam membuka akses pasar menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing beras lokal secara berkelanjutan.

### ***Potensi Implementasi Model Offtaker Lokal***

Model *offtaker* lokal memiliki potensi strategis untuk memperkuat ekosistem distribusi pertanian, khususnya pada komoditas beras di tingkat daerah. Kehadiran *offtaker* lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan klasik yang dihadapi petani, seperti fluktuasi harga saat panen raya, keterbatasan akses pasar, serta ketidakpastian serapan hasil produksi. *Offtaker* lokal berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, baik pasar modern, lembaga pangan pemerintah, maupun konsumen akhir secara langsung (Setiawan & Lubis, 2022). Dengan skema *offtaker*, petani tidak hanya mendapatkan kepastian pasar, tetapi juga bisa memperoleh pendampingan terkait kualitas produk yang sesuai standar pasar, sehingga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

*Offtaker* lokal memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sistem distribusi beras yang ada saat ini di Kabupaten Purworejo, khususnya dalam hal efisiensi, transparansi harga, dan pemberdayaan petani. Salah satu keuntungan utama dari model *offtaker* lokal adalah kemampuannya memperpendek rantai distribusi yang panjang, yang saat ini membuat petani sangat bergantung pada tengkulak atau perantara yang mengurangi pendapatan petani. Dengan adanya *offtaker* lokal seperti koperasi atau BUMDes, yang bertindak sebagai pembeli gabah atau beras langsung dari petani, petani mendapatkan kepastian harga yang lebih baik dan lebih stabil. Keunggulan lainnya adalah pengurangan ketergantungan petani pada tengkulak, yang sering kali memanfaatkan posisi tawar yang rendah untuk menawarkan harga yang tidak menguntungkan kepada petani. Dalam model *offtaker* lokal, petani dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih kompetitif karena *offtaker* memiliki hubungan langsung dengan pasar, baik itu pasar modern, *e-commerce*, atau lembaga pemerintah seperti BULOG. Hal ini memungkinkan distribusi yang lebih transparan dan dapat meminimalkan risiko fluktuasi harga yang ekstrem, terutama saat panen raya. Selain itu, model *offtaker* lokal juga mendorong penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau BUMDes, yang dapat memperbaiki tata kelola usaha tani dan meningkatkan kapasitas manajerial petani. Dengan akses kepada modal kerja yang lebih baik, seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi dan BUMDes dapat membantu petani membeli alat-alat pascapanen yang modern dan meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan, sehingga dapat bersaing dengan beras dari daerah lain. Ini juga membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk beras melalui pengolahan pascapanen yang lebih baik, seperti penggilingan dan pengemasan beras yang lebih efisien. Secara keseluruhan, model *offtaker* lokal memberikan alternatif yang lebih adil dan efisien dalam distribusi beras, yang tidak hanya menguntungkan petani tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing beras lokal di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.

Dari segi implementasinya, model *offtaker* lokal sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan yang mendukungnya. Banyak inisiatif *offtaker* di daerah yang gagal bertahan karena kelembagaan yang lemah, seperti kurangnya struktur organisasi yang jelas, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP), lemahnya permodalan, serta minimnya dukungan manajerial. Penguatan kelembagaan menjadi prasyarat utama agar peran *offtaker* lokal dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Rachman et al., 2019). Kelembagaan yang kuat memungkinkan *offtaker* lokal memiliki legalitas yang jelas, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta kapasitas dalam melakukan kontrak dagang secara adil dengan petani.

Untuk memperkuat kelembagaan *offtaker* lokal, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, perlu ada pendampingan kelembagaan dan manajerial, mulai dari pembentukan badan usaha seperti koperasi modern, BUMDes, atau unit usaha gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berorientasi pasar. Lembaga ini harus memiliki kepengurusan yang profesional dan transparan dalam pengelolaan bisnis. Kedua, diperlukan akses terhadap pembiayaan baik melalui perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun skema pembiayaan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola *linkage* yang melibatkan *offtaker* sebagai penjamin pasar. Ketiga, perlu ada penguatan pada aspek kontrak kemitraan antara petani dan *offtaker*, termasuk penyusunan perjanjian yang jelas mengenai harga,

volume, kualitas produk, dan skema pembagian risiko, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Syahyuti, 2018).

Selain itu, penting untuk membangun sistem informasi pasar berbasis digital yang dapat diakses oleh petani dan *offtaker*, sehingga kedua belah pihak memiliki informasi yang setara mengenai harga pasar, kebutuhan pasokan, dan tren permintaan konsumen. Pemerintah daerah juga perlu hadir sebagai fasilitator dengan memberikan regulasi yang mendukung, seperti kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung (gudang, alat pengering, penggilingan modern), serta insentif bagi lembaga yang menjalankan fungsi *offtaker* secara profesional. Dengan demikian, model *offtaker* lokal bukan hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga dan pasar, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi petani secara struktural dan berkelanjutan.

### ***Hasil Studi Komparatif***

Implementasi model *offtaker* lokal di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada kekuatan kelembagaan yang mendukungnya. Di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan, skema *offtaker* lokal mulai dikembangkan melalui kemitraan antara koperasi tani dengan perusahaan penggilingan beras modern. Di Kabupaten Kendal, koperasi “Tani Makmur” bekerja sama dengan mitra penggilingan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang kompetitif di atas harga pasar lokal. Keberhasilan ini tidak lepas dari penguatan kelembagaan koperasi yang telah membangun SOP transaksi, memiliki manajemen profesional, serta akses permodalan dari perbankan daerah. Selain itu, pendampingan dari Dinas Pertanian setempat turut mendorong proses negosiasi harga dan memastikan kepastian kontrak. Hasilnya, daya tawar petani meningkat dan distribusi gabah menjadi lebih stabil, sehingga petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak (Setiawan & Lubis, 2022).

Sebaliknya, di Kabupaten Purworejo, model *offtaker* lokal masih menghadapi tantangan serius dari sisi kelembagaan. Beberapa Gapoktan yang mencoba menjadi *offtaker* mengalami kendala berupa lemahnya manajemen bisnis, tidak adanya kontrak formal dengan mitra dagang, serta keterbatasan permodalan untuk membeli gabah dalam skala besar. Akibatnya, upaya *offtaker* lokal seringkali gagal mengimbangi peran pedagang pengumpul yang sudah memiliki jejaring lebih luas dan modal lebih kuat. Hal ini membuat posisi tawar petani tetap rendah karena harga gabah di tingkat petani seringkali di bawah harga acuan pemerintah saat panen raya. Kelembagaan yang lemah ini menjadi faktor kunci kegagalan implementasi model *offtaker* lokal di Kabupaten Purworejo (Rachman et al., 2019).

Di luar Jawa Tengah, terdapat contoh keberhasilan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang mengembangkan skema *offtaker* melalui kelembagaan koperasi berbasis korporasi petani. Koperasi di Kabupaten Pinrang berhasil menjalankan fungsi *offtaker* dengan dukungan dari pemerintah daerah dan akses ke pasar beras premium di Kota Makassar dan sekitarnya. Kunci keberhasilan di Kabupaten Pinrang terletak pada integrasi kelembagaan petani dengan penggilingan modern, logistik pasca panen, serta digitalisasi transaksi melalui *platform* jual beli daring. Dengan model ini, petani mendapatkan harga yang lebih baik, dan kepastian serapan hasil panen pun meningkat secara signifikan (Firdaus & Aulia, 2020).



Sebaliknya, studi di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa kegagalan model *oftaker* lokal sering disebabkan oleh konflik internal kelembagaan, rendahnya literasi bisnis di kalangan pengurus, serta minimnya dukungan infrastruktur logistik seperti gudang dan pengering. Di Kabupaten Lampung Timur, koperasi tani yang semula dirancang sebagai *oftaker* justru mengalami penumpukan utang karena tidak mampu mengelola pembelian gabah secara berkelanjutan. Akibatnya, petani kembali bergantung pada tengkulak yang menawarkan pembayaran langsung tunai meski dengan harga rendah (Susilowati, 2021).

Dari studi komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor kelembagaan menjadi determinan utama keberhasilan atau kegagalan model *oftaker* lokal. Daerah yang berhasil umumnya memiliki koperasi atau kelembagaan petani yang kuat, profesional, memiliki jaringan pasar yang jelas, serta didukung oleh pemerintah daerah melalui regulasi dan fasilitas infrastruktur. Sementara itu, daerah yang gagal cenderung menghadapi masalah manajerial, lemahnya tata kelola, minimnya akses modal, serta tidak adanya sistem kontrak yang mengikat antara *oftaker* dan petani.

## **Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

### ***Simpulan***

Distribusi beras berbasis model *oftaker* lokal di Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tawar petani. Dengan menggunakan model ini, peran *oftaker* lokal seperti koperasi, BUMDes, atau Gapoktan, dapat memperpendek rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien, yang selama ini merugikan petani. Penguatan kelembagaan *oftaker* lokal menjadi kunci utama dalam menjamin harga yang stabil dan adil bagi petani, serta meningkatkan transparansi dalam proses distribusi beras. Hasil komparatif dengan daerah lain menunjukkan bahwa daerah yang sukses menerapkan model ini didorong oleh kelembagaan yang kuat dan dukungan kebijakan yang tepat.

Penerapan model *oftaker* lokal dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Purworejo. Kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan kelembagaan, akses permodalan, serta infrastruktur pascapanen yang memadai akan mempercepat implementasi model ini secara lebih luas. Oleh karena itu, penguatan sistem distribusi berbasis *oftaker* lokal berpotensi besar dalam meningkatkan daya saing beras lokal, menstabilkan harga gabah, serta memberikan keuntungan yang lebih baik bagi petani.

### ***Rekomendasi Kebijakan***

Dari kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam bentuk intervensi kebijakan berdasarkan prioritasnya sebagai berikut:

#### **1) Penguatan Kelembagaan Petani dan *Oftaker* Lokal**

Pemerintah daerah perlu segera memberikan pendampingan kelembagaan kepada koperasi, BUMDes, dan Gapoktan yang dapat berfungsi sebagai *oftaker* lokal. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas manajerial, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, serta penguatan organisasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kelembagaan yang kuat akan

memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran offtaker dalam sistem distribusi beras.

- 2) Penyediaan Akses Pembiayaan untuk *Offtaker* dan Kelembagaan Petani  
Pemerintah harus menyediakan akses pembiayaan yang lebih baik untuk *offtaker* lokal, seperti koperasi dan BUMDes, dengan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis rantai pasok. Akses pembiayaan ini penting agar offtaker lokal dapat membeli hasil panen petani dalam jumlah yang cukup, memperkuat modal kerja mereka, dan mendukung pengolahan pascapanen yang lebih baik. Penguatan Infrastruktur Pasca Panen dan Distribusi.
- 3) Untuk mendukung efisiensi model *offtaker* lokal, pembangunan infrastruktur pascapanen seperti penggilingan modern, alat pengering gabah, dan gudang penyimpanan bersertifikasi perlu diprioritaskan. Infrastruktur yang baik akan memperbaiki kualitas beras, mencegah kerugian akibat penyusutan mutu, dan memastikan produk beras dapat memenuhi standar pasar. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Daerah.
- 4) Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah (Perbup) yang mengatur kemitraan distribusi pertanian berbasis offtaker lokal, serta memberikan insentif bagi koperasi atau BUMDes yang berhasil menerapkan model ini. Peraturan ini harus mencakup penetapan Harga Pembelian Minimum (HPM) dan kebijakan yang mendukung sistem distribusi yang lebih adil.

## Referensi

- Adnyani, N. N., Antara, M., & Wijayanti, P. U. (2022). Pengaruh pendapatan, konsumsi rumah tangga, dan sosial demografi terhadap kesejahteraan keluarga petani padi di Subak Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Journal of Agribusiness and Agritourism*. <https://doi.org/10.24843/jaa.2022.v11.i02.p34>
- Arida, A., Masbar, R., Majid, M. S. A., & Indra, I. (2023). Does vertical asymmetric price transmission exist in the rice markets? *Agricultural and Resource Economics*. <https://doi.org/10.51599/are.2023.09.01.04>
- Arifah, D. A. E. N., & Antriandarti, E. (2022). Saluran distribusi beras di Kabupaten Klaten. *Viabel: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 16(1), 29–40. <https://doi.org/10.35457/viabel.v16i1.1732>
- Badan Litbang Pertanian. (2020). *Inovasi teknologi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan*. Kementerian Pertanian RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Rata-rata harga gabah bulanan menurut kualitas, komponen mutu dan HPP di tingkat penggilingan, 2014*. Diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA0NyMy/rata-rata-harga-gabah-bulanan-menurut-kualitas-komponen-mutu-dan-hpp-di-tingkat-penggilingan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Harga produsen gabah dan harga konsumen beras*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2024). *Perkembangan nilai tukar petani dan harga produsen gabah Jawa Tengah April*. Diakses pada 14 Juli 2025, dari <https://purworejokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/03/125/perkembangan-nilai-tukar-petani-dan-harga-produsen-gabah-jawa-tengah-april-2024.html>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2021). *Statistik harga produsen gabah Kabupaten Purworejo 2020*. Diakses pada 14 Juli 2025, dari <https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2021/12/28/a72a8570dbf3ebd02770e51d/statistik-harga-produsen-gabah-kabupaten-purworejo-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2020). *Statistik harga produsen gabah Kabupaten Purworejo 2020*. Diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2021/12/28/a72a8570dbf3ebd02770e51d/statistik-harga-produsen-gabah-kabupaten-purworejo-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Diakses pada 12 Juli 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQIBSU3MwVHpOVWR6MDkjMyMzMzAw/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Diakses pada 14 Juli 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQIBSU3MwVHpOVWR6MDkjMyMzMzAw/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Diakses pada 14 Juli 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQIBSU3MwVHpOVWR6MDkjMyMzMzAw/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html?year=2022>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Diakses pada 14 Juli 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKYWFIQIBSU3MwVHpOVWR6MDkjMyMzMzAw/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html?year=2021>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Rata-rata harga gabah di tingkat petani menurut kabupaten dan kelompok kualitas di Provinsi Jawa Tengah, 2018*. Diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODE3IzI=/rata-rata-harga-gabah--di-tingkat-petani-menurut-kabupaten-dan-kelompok-kualitas-di-provinsi-jawa-tengah--rupiah-kg-.html>
- Bappeda Jawa Tengah. (2025). *Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2024 6 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 – 2045*. Bappeda Jateng. Dari <https://owncloud.jatengprov.go.id/index.php/s/hUEgq2U2JbXpDv1>
- Beddu, M., Modding, B., & Herman, B. (2025). Peningkatan produksi beras terhadap perbaikan ekonomi masyarakat melalui kerjasama industri di Kabupaten Pinrang. *Amsir Community Service Journal*, 3(1), 70–74. <https://doi.org/10.62861/acsj.v3i1.452>
- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation*. Pearson.
- Christopher, M. (2016). *Logistics and supply chain management*. Pearson Education.

- Dinan, R. (2023). Assessment of agricultural land carrying capacity for food availability in Situbondo Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pertanian*. <https://doi.org/10.31849/jip.v20i1.11809>
- Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Purworejo. (2023). *Data statistik pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2023*. DPPKP Purworejo.
- Fauzia, H., & Nugraha, S. B. (2019). *Developing local potency in rural area of Purworejo to strengthen regional competitiveness*. <https://doi.org/10.2991/ICORSIA-18.2019.71>
- Firdaus, M., & Aulia, A. (2020). Daya saing beras domestik dalam era perdagangan bebas. *Jurnal Agro Ekonomi*, 31(2), 123-135.
- Food and Agriculture Organization. (2013). *Contract farming handbook*. Food and Agriculture Organization.
- Hermawati, I., Sahara, D., Koeswinarno, Saputra, M. H., Puspitasari, I., & Tusino. (2023). *Kajian daya saing pertanian dengan pendekatan rantai pasok di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah*. Badan Riset dan Inovasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *Panduan pengembangan BUMDes berbasis agribisnis*. Kemendes.
- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. (2022). *Peran koperasi dalam rantai nilai pangan*. Kemenkop UKM.
- Kementerian Pertanian. (2021). *Statistik pertanian 2021*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Model kemitraan offtaker dalam penguatan rantai pasok pangan*. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- NU Online. (2025). Harga gabah saat panen raya justru turun, guru besar UGM ungkap 3 faktor penyebabnya. Diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://www.nu.or.id/nasional/harga-gabah-saat-panen-raya-justru-turun-guru-besar-ugm-ungkap-3-faktor-penyebabnya-bAzf4>
- OECD. (2020). *Farmer bargaining power and agricultural cooperatives*. OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Pratama, H. R. H. & Nasikh. (2022). Analisis potensi sektor pertanian sebagai pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo. *Ekonomikawan*, 2 (22), <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.10204>
- Purnomo, D., & Riyanto, S. (2022). Penguatan distribusi beras melalui model offtaker di Kabupaten Subang. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 55–68.
- Purworejo.sorot.co. (2023). Harga gabah anjlok saat panen raya, maling meningkat. Diakses pada 13 Juli 2025, dari <https://purworejo.sorot.co/berita-12489-harga-gabah-anjlok-saat-panen-raya-maling-meningkat.html#:~:text=Pemerintah%20daerah%20harus%20turun%20tangan,dengan%20meningkatkan%20patroli%20di%20desanya.&text=Temukan%20dan%20langganan%20berita%20lainnya%20di%20Google%20News%2C%20Sorot%20Purworejo>.
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). (2021). *Analisis nilai tambah dan distribusi margin pada komoditas pangan strategis*. Badan Litbang Pertanian.

- Rachman, B., et al. (2019). Kelembagaan petani dan akses pasar: Studi kasus beras di Indonesia. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 22(3), 233-244.
- Rahman, A. (2020). Peran UMKM dalam memotong rantai distribusi pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45–58.
- Schmitz, A., Moss, C., Schmitz, T. G., Furtan, W. H., & Schmitz, H. C. (2010). *Agricultural Policy, Agribusiness, and Rent-Seeking Behaviour*. University of Toronto Press.
- Setiawan, B., & Lubis, D. (2022). Penguatan offtaker lokal dalam rantai nilai pertanian. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 77-88.
- Setiawan, B., Wibowo, A., & Lestari, P. (2021). Kemitraan offtaker sebagai strategi penguatan ekonomi petani. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 89–102.
- Setyowati, N., & Wulandari, T. (2021). Kemitraan berbasis koperasi dalam distribusi beras organik di Sleman. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 17(2), 120–132.
- Silaban, R. R., & Yuliaty, Y. (2019). Analisis pemasaran beras di kecamatan sidorejo kota salatiga. <https://doi.org/10.31602/ZMIP.V44I3.2213>
- Susilowati, S. H. (2021). Infrastruktur pertanian sebagai penopang daya saing komoditas lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 211-225.
- Susilowati, S. H., & Rakhman, R. (2018). Kontrak farming: Peluang dan tantangan bagi petani kecil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 26(1), 1–14.
- Sutrisno, J., Marwanti, S., Ulfa, A. A. N., Nurhidayati, I., & Putri, H. A. A. (2023). Institutional transformation of the food security agency: Perspectives on the management of Toko Tani Indonesia program in Central Java. *IOP Conference Series*, 1200(1), 012064–012064. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1200/1/012064>
- Syahyuti. (2018). *Pertanian dan pembangunan pedesaan: Perspektif ekonomi kelembagaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Utami, S. S., & Pertiwi, W. N. (2022). Analisis risiko produksi dan risiko pendapatan pada usahatani padi di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. *Vigor*. <https://doi.org/10.31002/vigor.v6i2.4104>
- Utami, N. F., Turukay, M., & Leatemia, E. D. (2022). Analisis pemasaran beras di Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.593>
- World Bank. (2020). *Transforming food systems for affordable healthy diets*. World Bank.